

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam kehidupan terdapat suatu elemen penting, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi [1]. Teknologi Informasi juga diperlukan dalam institusi atau lembaga dalam melakukan perkembangan dan menghadapi persaingan [2]. Terdapat beberapa manfaat dalam penerapan TI yaitu dapat meningkatkan kecepatan dan ketepatan informasi data, juga dapat meningkatkan risiko negatif akan tujuan sebuah perusahaan. Di mana ketergantungan perusahaan berkenaan TI akan membuat dampak risiko terhadap perusahaan semakin besar. Risiko yang timbul dapat mempengaruhi ketidakefektifan proses kerja, kerugian keuangan, kualitas perusahaan yang menurun hingga tidak tercapainya tujuan dari perusahaan [3].

Tingkat ketersediaan TI yang memadai bisa didapatkan dengan menerapkan tata Kelola TI, yang memberikan perhatian kepada semua isu terkait kesiapan layanan, meliputi layanan serta sumber dayanya, yang memastikan dapat tercapainya ketersediaan layanan pada semua sistem [4]. Apabila terjadi gangguan pada Teknologi Informasi yang dimiliki, maka pengelolaan yang profesional, sumber daya yang handal serta biaya yang cukup besar dengan risiko kegagalan yang tidak kecil sangat dibutuhkan dalam penerapan Teknologi Informasi [5]. Maka dari itu, untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, implementasi TI juga perlu diiringi dengan pengelolaan yang tepat dan relevan [6].

Efisiensi dan efektifitas juga merupakan manfaat pada sebuah organisasi atau perusahaan, jika TI dikelola dengan baik [7]. Harapannya tata kelola TI yang

berada di sebuah organisasi dapat menjamin bahwa semua kegiatan bidang TI memang bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan dari organisasi tersebut [8].

Terdapat beberapa kerangka kerja yang dapat dijadikan acuan dalam tata kelola TI yaitu *COBIT*, *ISO*, *ITIL*, *COSO*, dan *PMBOK* (Waluyan, Manuputty, 2016)(Beauchamp, 1974). Fungsi penggunaan kerangka kerja itu sendiri sebagai model referensi agar kualitas tata kelola TI seperti tujuan, aplikabilitas, terminologi, peran, dan tanggung jawab lebih terkonseptual [9] (Waluyan, Manuputty, 2016). *COBIT (Control Objectives for Information and related Technology)* adalah sebuah kerangka kerja/framework IT yang diterbitkan oleh ISACA (Information System Audit and Control Association) [10].

COBIT dikembangkan sejak tahun 1999 oleh orang-orang berlatar belakang auditor yang tergabung dalam IT Governance Institute (ITGI) dan *Information Systems Audit and Control Association (ISACA)* yang sebelumnya *Information System Audit and Control Foundation (ISACF)* [11].

COBIT mengintegrasikan praktik-praktik yang baik dalam pengelolaan teknologi informasi dan menyediakan *framework* untuk tata kelola TI yang dapat membantu pemahaman dan pengelolaan risiko serta memperoleh keuntungan terkait dengan teknologi informasi [12].

COBIT yang digunakan pada penelitian kali ini adalah COBIT 2019. COBIT 2019 adalah pembaharuan dari COBIT sebelumnya. Berkembangnya teknologi dan informasi maka berkembang juga kebutuhan sebuah organisasi, maka dari itu ISACA melakukan penyelarasan COBIT agar tetap relevan guna membantu

organisasi agar tujuan bisnisnya tercapai. COBIT 2019 meningkatkan berbagai bidang dari versi COBIT sebelumnya yaitu *flexibility and openness*, melakukan penambahan fokus area yang baru; *currency and relevance*, mendukung referensi dan penyesuaian konsep dari sumber sebelumnya; *perspective application*, bersifat deskriptif dan preskriptif, penerapan tata kelola disesuaikan dengan komponennya; *performance management of IT*, struktur model manajemen lebih konseptual. Konsep kematangan dan kemampuan diperkenalkan untuk penyesuaian yang lebih baik dengan CMMI. Juga seperti yang disebutkan bahwa fokus area pada COBIT 2019 terdapat penambahan, seperti pada profil risiko, terdapat 19 kategori risiko [13].

Pengukuran tingkat kapabilitas berfungsi untuk mengetahui sejauh mana proses-proses TI yang dikelola oleh organisasi guna dapat mengoptimalkan sumber daya TI [14]. COBIT 2019 memiliki 5 (lima) model kapabilitas proses untuk mengukur tingkat kapabilitas proses tata kelola teknologi informasi yang terdiri dari domain EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA dan terdiri atas kumpulan dari 40 proses tata kelola dan manajemen TI [13]. Juga memberikan panduan perbaikan tata kelola TI melalui analisis *Critical Success Factor*, *Key Goal Indicator* dan *Key Performance Indicator* [7].

Saat ini juga teknologi informasi telah berkembang pesat hingga menjadi bagian dalam sistem pemerintahan sebagaimana terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor: 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tahun 2003 [15]. Selain itu kebijakan penerapan tata kelola TI pun terdapat pada

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 [16].

Salah satu badan pemerintahan yang sudah menerapkan teknologi informasi adalah Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan aset, BPAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, BPAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dikoordinasikan oleh Asisten dan Keuangan. Dalam mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah, BPAD dihadapkan dengan permasalahan aset yang datanya tidak sesuai antara data dan aset yang ada di SKPD/UKPD dan menyebabkan tidak diterimanya dataaset oleh BPK RI.

Maka dari itu BPAD menyediakan berbagai sistem dalam pengelolaan aset agar antara data dan aset yang ada dapat terintegrasi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dan dapat mengetahui alasan perbedaaan antara data dan aset yang dimiliki. Namun dalam penerapannya terdapat dua masalah utama yang sampai saat ini masih harus terus diperbaiki, yaitu pertama keseriusan level pimpinan pada BPAD dalam memaksimalkan penggunaan sistem yang dibuat, dan integrasi dalam internal BPAD dan integrasi kepada eksternal BPAD yaitu SKPD dan UKPD di luar BPAD, sehingga masih adanya permasalahan dalam pengelolaan aset dikarenakan kurang optimalnya penggunaan sistem.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan di atas diperlukannya pengelolaan hubungan antara internal dan eksternal perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan, juga pengelolaan risiko untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi dalam pengelolaan aset. Juga dalam memutuskan pembuatan sebuah sistem hanya berdasarkan masalah yang ada sebelumnya, tanpa mengetahui prioritas risiko dari masalah tersebut.

Manajemen risiko adalah kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi berkenaan dengan risiko [6]. Manajemen sendiri menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan mengatakan bahwa Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain nya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Penilaian penerapan manajemen risiko TI dibutuhkan agar perusahaan mampu mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan [17]. Selain itu penting juga perlu adanya kegiatan pengorganisasian yang tepat dalam suatu perusahaan, mulai dari identifikasi, penguatan organisasi, dan kemampuan kepemimpinan perusahaan, guna menguatkan manajemen perusahaan dan pencapaian tujuan organisasi [18]. Penelitian ini menggunakan metode COBIT 2019, karena memiliki keselarasan anantara tujuan COBIT dengan tujuan perusahaan. Berikut adalah pemetaan dari tujuan COBIT dan tujuan perusahaan :

Tabel 1. 1 Pemetaan Tujuan Perusahaan dan COBIT

COBIT	Sub Bidang Data dan Informasi
Mengevaluasi tata kelola TI, menyediakan ukuran, indicator, proses, dan kumpulan praktik terbaik untuk membantu instansi lebih optimal dari pengolahan TI, serta mengembangkan pengendalian terhadap manajemen TI yang lebih baik untuk suatu organisasi.[19]	Memfasilitasi kebutuhan pengelolaan aset yang berada di DKI Jakarta secara terintegrasi. Membuat dan meningkatkan kualitas sistem dalam pengelolaan aset.

Berdasarkan permasalahan di atas acuan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah framework COBIT 2019 dengan domain APO 08 *Managed Relationship*, EDM 05 *Ensured Stakeholder Engagement*, dan APO 12 *Managed Risk*, dengan rincian sebagai berikut :

- APO 08 *Managed Relationship* = Hubungan antara internal dan eksternal perusahaan yang masih belum terintegrasi dengan baik, sehingga masih sering adanya kendala dalam proses mencapai kerjasama maupun tujuan dalam pengelolaan aset.
- EDM 05 *Ensured Stakeholder Engagement* = Kurangnya keseriusan level pimpinan BPAD dalam memaksimalkan penggunaan sistem, sehingga diperlukannya integrasi antara sub bidang data dan informasi sebagai penyedia sistem dengan Kepala Badan maupun bidang lain dalam BPAD itu sendiri.
- APO 12 *Managed Risk* = Perlunya penerapan TI dalam pengelolaan risiko dan juga perlu mengetahui prioritas risiko dalam proses pengelolaan aset sehingga dapat lebih maksimal.

Harapannya BPAD dapat lebih sadar akan pentingnya tata kelola TI dan manajemen risiko terhadap kinerja perusahaan agar kedepannya dapat mendukung tujuan perusahaan dengan lebih baik. Permasalahan di atas mendasari harapan perusahaan yang mana sebagai fasilitator sistem dalam pengelolaan aset dapat saling terintegrasi dengan internal dan eksternal, juga dapat mendapat dukungan penuh dari pimpinan, dan dapat terus meningkatkan kualitas dari sistem, sehingga tujuan BPAD dapat tercapai.

Berdasarkan pemaparan penelitian di atas, belum banyak ditemukan tata kelola TI dengan COBIT 2019, sehingga hasil penelitian ini dituangkan ke dalam judul “Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan framework COBIT 2019 (Studi Kasus : Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian atas latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil level kapabilitas BPAD dalam *manage relationship* dan *ensured stakeholder engagement*?
2. Bagaimana hasil level kapabilitas BPAD dalam mengelola risiko?
3. Bagaimana keputusan yang didapat berdasarkan hasil pengukuran?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian ini adalah Bidang Penatausahaan Aset pada BPAD.
2. Proses yang digunakan adalah EDM 05, APO 08, dan APO 12.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Memberikan rekomendasi kepada BPAD dalam mengelola hubungan dengan internal dan eksternal perusahaan.
2. Mengidentifikasi pengelolaan risiko pada BPAD.
3. Memberikan rekomendasi terkait terkait pengelolaan risiko.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat membantu proses pengambilan keputusan terkait pembuatan sistem pada perusahaan dan meningkatkan kesadaran

pentingnya tata kelola TI.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat membantu pemahaman dan menambah pengetahuan terkait Cobit 2019 dan tata kelola TI. Serta dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti terkait IT Governance dan Cobit 2019 bagi perkembangan TI. Tujuan Penelitian
Penelitian
manfaat Penelitian